

**PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

Aldi Hermawan

NIM. 4011811063

Program Peminatan: Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
BAGIAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BANGKA
2025**

**PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA
ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF
ASAS KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi S1 Hukum Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung**



Oleh:

Aldi Hermawan

NIM. 4011811063

Program Peminatan: Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
BAGIAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BANGKA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Aldi Hermawan
NIM	:	4011811063
Program Peminatan	:	Hukum Tata Negara
Jurusan	:	Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Problematika Hukum Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Bangka, 18 Juli 2025



Aldi Hermawan
NIM. 4011811063

HALAMAN PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Oleh:

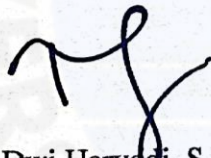
Aldi Hermawan

NIM. 4011811063

Program Peminatan: Hukum Tata Negara

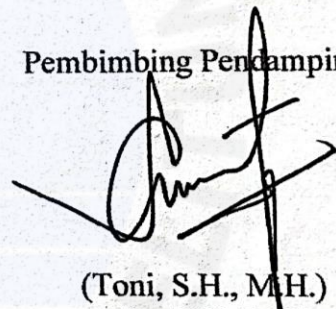
Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Hukum
Bagian Hukum
Fakultas Hukum



(Bunga Permatasari, S.H., M.H.)
NIP. 198908262020122016

HALAMAN PENGESAHAN

PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

SKRIPSI

Oleh:

Aldi Hermawan

NIM. 4011811063

Program Peminatan: Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada tanggal 22 Juli 2025
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- 1 Ketua : Yokotani, S.H., M.H.
NIPPPK. 196211102021212001
- 2 Sekretaris : Rahmat Robuwan, S.H., M.H.
NIP. 199201222019031015
- 3 Anggota : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 1983071720121004
- 4 Anggota : Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Dr. Jeanne Dore Noviyanti Manik, S.H., M.Hum.
NIPPPK. 197311052021212006

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“KEJAYAAN TIDAK DATANG SEKETIKA.”

ادعسو لا اسنن الل فلكي ل

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:

- Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jupri dan Ibunda Kiki Marianti yang selalu mendoa'akan yang terbaik untuk penulis, mengasihi dan menyayangi penulis, memberikan banyak sekali dukungan moril dan materi sejak lahir hingga saat ini kepada penulis, dan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini dengan baik.
- Kepada adikku yang ku sayangi, Muhammad Al Fikri yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dan menjadi saudara juga keluarga yang terbaik sampai saat ini untuk penulis.
- Kepada Ir. Suhdi, S.S.T., M.T., Ph.D. dan Desi Irnolia Sukarni Terimakasih busu yang telah memberikan dukungan dan menjadi orang tua selama penulis menyelesaikan Pendidikan sampai selesai

ABSTRAK

Aldi Hermawan
4011811063

PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Skripsi, Fakultas Hukum, 2025

**Kata Kunci: Legalitas, Izin Usaha Pertambangan, Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir DanPulau-Pulau Kecil(RZWP3K), Kepastian Hukum.**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk ditelaah terhadap kepastian hukum antara Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 503/002/OP-L/BPMPT/2015 yang sudah terlebih dahulu di terbitkan. Keduanya sama-sama berlaku dan memiliki kepastian hukum, namun dari keduanya memiliki konflik terkhusus pada Kabupaten Belitung Timur (Pesisir Pantai Olivier). Dalam Peraturan Daerah RZWP3K tidak ada alokasi ruang untuk aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana kedudukan Peraturan Daerah sebagai aturan pengendalian zona ruang di Provinsi Bangka Belitung dan mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung Timur sebagai zero tambang sesuai dengan asas kepastian hukum dalam *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis normatif (*yuridis normatif*) dan bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K lebih tinggi dari Izin Usaha Pertambangan dan kedua penelitian ini menyimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan di wilawah Olivier tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam *Good Governance* berdasarkan asas Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Aldi Hermawan
4011811063

LEGAL PROBLEMS OF REGIONAL REGULATIONS ON ZONING PLANS FOR COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS AND MINING BUSINESS PERMITS FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY

Thesis, Faculty of Law, 2025

***Keywords: Legality, Mining Business Permits, Coastal Area and Small Island
Zoning Plans, Legal Certainty.***

This research is motivated to provide results from research on legal certainty between the Regional Regulation of the Bangka Belitung Islands Province Number 3 of 2020 concerning the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands and Mining Business Permit (IUP) Number 503/002/OP-L/BPMPT/2015 which has been previously issued, where both are valid and have legal certainty, but both have conflicts, especially in East Belitung Regency (Olivier Coast) in this case the Regional Regulation RZWP3K does not allocate space for mining activities in the area. This study aims to examine and determine how the position of Regional Regulations as spatial zone control regulations in Bangka Belitung Province and to find out whether the Mining Business Permit (IUP) in East Belitung Regency as a zero mine is in accordance with the principle of legal certainty in Good Governance. The research method used in this study is normative (normative juridical) and prescriptive. The results of this study show that the position of the RZWP3K Regional Regulation is higher than the Mining Business Permit and these two studies conclude that the Mining Business Permit in the Olivier region is not in accordance with the principle of legal certainty in Good Governance based on the principles of Openness, Accountability, and Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanna Wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM.”** Penulisan skripsi ini merupakan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ibrahim, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan serta mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

3. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis sejak awal perkuliahan.
4. Bapak Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Rafiqs Sari, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang mengajarkan ilmunya kepada penulis.
6. Ibu Bunga Permatasari, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi S-1 Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis juga mengarahkan kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan arahan akademis kepada penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu untuk penulis selama penulisan skripsi ini dan memberikan serta mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

9. Bapak Toni, S.H.,M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Para Bapak/Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang berharga kepada penulis selama masa kuliah.
11. Staf Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Administrasi Umum dan Keuangan, dan Staf Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas bantuan pengurusan perkuliahan yang diberikan kepada penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
12. Untuk Pakcik Jefriden dan Makcik Fitriana Evi yang telah memberi dukungan secara moril maupun materi kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Untuk sahabatku Saripudin Tanjung S.H. yang telah banyak membantu mulai dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi sampai selesai.
14. Untuk Rizqy Alif Akbar sepupuku yang selalu memberi dukungan dan selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi.
15. Untuk Dinda Leony Meralda terimakasih telah menemani dan menjadi tempat bercerita yang selalu memberikan dukungan penuh.

16. Untuk teman-teman satu kelas (*B-Law '18*) serta seluruh rekan-rekan Kader DPC PERMAHI BABEL terkhusus angkatan 2018 dan Senior-senior DPC PERMAHI BABEL, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu serta pengalaman dari awal masa perkuliahan sampai dengan sekarang.
17. Untuk almamaterku tercinta Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.
18. Untuk diriku sendiri yang telah mampu melewati dinamika selama perjalanan menulis skripsi ini sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mohon untuk sekiranya hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penulisan skripsi ini dapat dimaklumi. Penulis juga tidak menutup kritik dan saran yang sifatnya membangun dan dapat berguna bagi penulis untuk ke depannya, justru kritik dan saran itulah yang diharapkan ada oleh penulis agar menjadi acuan untuk dapat lebih baik ke depannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua orang.

Bangka, 18 Juli 2025

(Aldi Hermawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Landasan Teori dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian	19
G. Orisinalitas Penelitian	25

BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, PERATURAN RZWP3K.....	30
A. Perizinan Usaha Pertambangan	30
B. Asas Kepastian Hukum.....	33
C. Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	37
D. Peraturan Daerah RZWP3K.....	44
BAB III PROBLEMATIKA HUKUM PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM.....	59
A. Kedudukan Peraturan Daerah RZWP3K Sebagai Aturan Pengendalian Zona Ruang di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	59
B. Tinjauan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Belitung Timur Sebagai Wilayah Zero Tambang Perspektif Asas Kepastian Hukum Dalam <i>Good Governance</i>	78
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	25
Tabel 2.1 Rencana Alokasi Ruang RZWP-3-K.....	46
Tabel 2.2 Perbandingan Peraturan Daerah dan Alokasi Ruang/Zonasi antara Indonesia dan Malaysia.....	57
Tabel 3.1 Perbandingan Problematika Hukum Peraturan Daerah dan Izin Usaha Pertambahan.....	69



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Letak Posisi IUP Pantai Oliver Dalam Peta Pulau Belitung.....	79
-------------------	---	----

